



Perjuangan Aktivistis di Bawah Hegemoni Rezim Zalim Perspektif Hr. Ibnu Hibban No. 286

Activists' Struggle Under the Hegemony of a Zalim Regime: Perspective of Hr. Ibn Hibban No. 286

نضال النشطاء في ظل هيمنة النظام الظالم: رؤية هـ. ابن حبان، العدد ٢٨٦

Cyndi Hidayat Attazkie¹, Mohammad Shodiq Ahmad²

STIU Darul Hikmah Bekasi¹²

cyndiha63@gmail.com¹, shodiq76@gmail.com²

Abstrak

Perjuangan para aktivis dalam menghadapi rezim yang zalim merupakan realitas sejarah yang terus berulang di berbagai era dan tempat. Rezim otoriter kerap menekan gerakan aktivisme melalui berbagai bentuk represi, baik struktural maupun psikologis. Penelitian ini mengkaji dinamika perjuangan aktivis di bawah tekanan kekuasaan zalim, dengan merujuk pada hadis riwayat Ibnu Hibban No. 286 yang menegaskan bahwa menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa zalim merupakan bentuk jihad paling utama. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif melalui studi hadis dan analisis historis, dengan merujuk pada literatur klasik maupun kontemporer, termasuk kitab hadis, tafsir, dan penelitian ilmiah relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa bentuk perlawanan aktivis tidak selalu bersifat konfrontatif, tetapi juga dapat diwujudkan melalui dakwah, pendidikan, dan diplomasi. Penelitian ini menghadirkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana perjuangan aktivis dapat berlangsung secara etis dan bermartabat, meski berada di bawah tekanan rezim yang menindas.

Kata Kunci: Aktivistis, Hegemoni, Rezim Zalim

Abstract

The struggle of activists against oppressive regimes is a historical reality that has been repeated in various eras and places. Authoritarian regimes often suppress activist movements through various forms of repression, both structural and psychological. This study examines the dynamics of activists' struggle under the pressure of oppressive rule, with reference to the hadith narrated by Ibn Hibban No. 286 which asserts that conveying the truth in the face of oppressive rulers is the most important form of jihad. The approach used is qualitative through hadith studies and historical analysis, with reference to classical and contemporary literature, including books of hadith, tafsir, and relevant scientific research. The results of the study show that the form of activist resistance is not always confrontational, but can also be realized through da'wah, education, and diplomacy. This research provides a deeper understanding of

how activists' struggles can take place ethically and with dignity, even under the pressure of an oppressive regime.

Keywords: *Activists, Hegemony, Regime, Hadith, Ibn Hibban*

المخلص

يُعدّ نضال النشطاء ضد الأنظمة القمعية واقعًا تاريخيًا تكرر في عصور وأماكن مختلفة. وكثيرًا ما تتمتع الأنظمة الاستبدادية بحركات النشطاء بأشكال مختلفة من القمع، الهيكلي والنفسي. تدرس هذه الدراسة ديناميكيات نضال النشطاء تحت ضغط الحكم الجائر، استنادًا إلى حديث ابن حبان رقم 286، الذي يؤكد أن تبليغ الحق في وجه الحكام الجائرين هو أهم أشكال الجهاد. يعتمد المنهج المتبع على دراسات الحديث والتحليل التاريخي، بالاعتماد على الأدبيات القديمة والمعاصرة، بما في ذلك كتب الحديث والتفسير والبحوث العلمية ذات الصلة. تُظهر نتائج الدراسة أن شكل المقاومة النشطة ليس دائمًا المواجهة، بل يمكن تحقيقه أيضًا من خلال الدعوة والتعليم والدبلوماسية. يوفر هذا البحث فهمًا أعمق لكيفية ممارسة النشطاء لنضالاتهم أخلاقيًا وبكرامة، حتى تحت ضغط النظام القمعي.

الكلمات الدالة: الناشطون، الهجمة، النظام، الحديث، ابن حبان

PENDAHULUAN

Dalam Islam, keberanian menyuarakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim merupakan salah satu bentuk jihad yang paling utama. Dalam Al-Qur'an, disebutkan,

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْبَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

“Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka lebih agung derajatnya di hadapan Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung”. Ayat ini mempertegas bahwa perjuangan menegakkan kebenaran, meskipun berhadapan dengan kekuatan besar dan penuh risiko, merupakan amal yang sangat mulia dan bernilai tinggi di sisi Allah. Aktivis yang bergerak dalam jalur ini tidak sekadar berjuang di ranah sosial-politik, melainkan sedang mengemban misi profetik (Almascaty, 2001).

Namun, tidak sedikit pula aktivis yang harus menghadapi nasib tragis, seperti dipenjara, disiksa, bahkan dibunuh. Hal ini menunjukkan bahwa medan perjuangan sangat berat dan memerlukan kesiapan mental dan spiritual yang tinggi (Puji, 2021). Dimana kondisi ini tidak lepas dari pengaruh hegemoni rezim zalim yang menggunakan kekuatan militer, propaganda, dan berbagai perangkat kekuasaan lainnya untuk membungkam suara-suara kebenaran. Hegemoni tersebut tidak hanya didominasi dengan yang bersifat fisik, tetapi juga ideologis. Rezim zalim tidak hanya menindas secara fisik, tetapi juga membentuk cara berpikir masyarakat agar tunduk terhadap kezaliman. Dalam konteks ini, para aktivis menjadi sangat penting karena merekalah yang melawan dominasi tersebut melalui dakwah, pendidikan, dan advokasi sosial (Gramsci, 2023).

Oleh karena itu, penelitian ini akan menjadi penting untuk mengkaji lebih dalam dinamika perjuangan para aktivis ini, tidak hanya dari aspek sejarah dan sosial, tetapi juga dari perspektif hadis. Kajian hadis menjadi penting karena hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an. Melalui hadis, kita dapat memahami bagaimana sikap Nabi terhadap kekuasaan yang zalim dan bagaimana beliau membimbing umat untuk tetap berada dalam rel yang benar meskipun menghadapi berbagai tekanan. Dengan demikian, penelitian ini menjadi sangat signifikan untuk memberikan pencerahan dan inspirasi bagi gerakan dakwah Islam kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konseptualisasi Aktivisme dan Rezim Zalim

1. Pengertian Aktivis

Individu yang secara aktif terlibat dalam perjuangan untuk perubahan sosial, politik, atau lingkungan disebut aktivis. Mereka melakukan ini melalui berbagai tindakan dengan corak teknis yang bermacam-macam. *“Orang yang tergabung dalam suatu organisasi politik atau keagamaan dan aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi tersebut”* adalah definisi aktivis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Menurut definisi ini, penting bagi seseorang untuk berpartisipasi secara aktif dalam organisasi yang bekerja untuk mencapai perubahan. Dalam arti yang lebih luas, aktivis tidak selalu berafiliasi dengan organisasi formal; mereka dapat bekerja secara independen atau dalam kelompok informal untuk memperjuangkan masalah yang mereka anggap penting. Aktivisme dapat terjadi di banyak bidang, seperti hak asasi manusia, lingkungan, pendidikan, kesehatan, dll.

2. Ragam Bentuk Aktivisme

Bergantung pada tujuan, strategi, dan konteks sosial-politik yang mendorongnya, aktivisme dapat mengambil berbagai bentuk. Beberapa bentuk aktivisme yang paling umum meliputi:

Pertama, Aktivisme Konvensional: Melibatkan partisipasi dalam proses politik formal, seperti pemungutan suara, kampanye politik, atau lobi kepada pembuat kebijakan. Salah satu contoh aktivisme konvensional tampak dalam peran partai politik saat pilkada serentak. Melalui mekanisme resmi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, partai-partai dapat mengusung calon kepala daerah jika memenuhi syarat suara atau kursi di DPRD. Seperti dijelaskan dalam jurnal Angga Natalia (2015), partisipasi ini menunjukkan bahwa aktivisme tidak selalu berupa aksi massa, tetapi bisa dilakukan secara formal melalui jalur politik yang sah dan terstruktur (Natalia, 2015).

Kedua, Aktivisme Non-Konvensional: Meliputi tindakan seperti demonstrasi, protes, boikot, dan pemogokan. Bentuk ini sering digunakan ketika saluran formal dianggap tidak efektif atau tertutup. Salah satu contohnya aktivis mahasiswa masih mempertahankan bentuk perjuangan non-konvensional seperti demonstrasi fisik di ruang publik. Aksi turun ke jalan tetap menjadi cara langsung untuk menyuarakan aspirasi dan menarik perhatian publik maupun pemerintah. Bentuk aktivisme ini sering dilihat dalam momentum penting seperti reformasi, unjuk rasa anti-korupsi, atau penolakan kebijakan kontroversial (Syahputri & Katimin, 2024)

Ketiga, Aktivisme Digital: Dengan perkembangan teknologi informasi, aktivisme juga merambah ke ranah digital. Aktivisme digital memanfaatkan platform online seperti media sosial, petisi daring, dan kampanye digital untuk menyebarkan pesan dan menggalang dukungan. Contoh seperti aktivis mahasiswa kini tidak hanya dilakukan dengan turun ke jalan, tetapi juga melalui kampanye digital di platform seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Mereka memanfaatkan konten visual, tagar viral, dan kolaborasi lintas kampus/bangsa via WhatsApp atau Telegram untuk menyebarkan isu secara cepat dan memperluas solidaritas. Strategi digital ini menjadi elemen kunci dalam memperkuat suara gerakan mahasiswa dan mendorong perubahan sosial-politik

Keempat, Aktivisme Lingkungan: Fokus pada isu-isu ekologis, seperti konservasi alam, penanggulangan perubahan iklim, dan advokasi terhadap kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Contohnya seperti para mahasiswa yang aktif mengangkat berbagai persoalan lingkungan ke ruang publik, baik lokal maupun internasional. Kampanye-kampanye tentang lingkungan tidak hanya membentuk opini publik, tetapi juga mendorong lahirnya kesadaran kritis di kalangan generasi muda. Aktivisme jenis ini mencerminkan kepedulian terhadap masa depan bersama dan menegaskan bahwa aktivis memiliki peran penting dalam memperjuangkan keadilan sosial dan keberlanjutan bumi

3. Pengertian Rezim Zalim

Rezim zalim adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pemerintahan atau penguasa yang menggunakan kekuasaan secara tidak adil, menindas, dan melanggar hak-hak dasar warganya. Rezim didefinisikan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* sebagai "pemerintahan yang sedang berkuasa; atau sistem pemerintahan yang digunakan pada suatu masa." Oleh karena itu, "rezim" adalah istilah yang mengacu pada bentuk kekuasaan yang mempengaruhi arah kebijakan dan kontrol terhadap masyarakat. Meskipun demikian, istilah "zalim" berasal dari bahasa Arab, dan artinya adalah

"meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya." Dalam konteks sosial-politik, arti ini mengacu pada penggunaan kekuasaan, penindasan, dan perlakuan sewenang-wenang terhadap masyarakat. "Bengis; tidak adil; tidak punya rasa belas kasih; kejam" adalah definisi zalim menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Maka, secara terminologis, *rezim zalim* adalah bentuk pemerintahan yang menyalahi prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan, serta cenderung mempertahankan kekuasaan melalui cara-cara represif, manipulatif, dan merugikan kepentingan hak-hak rakyat (Alzam, 2017).

4. Tinjauan Umum Rezim Zalim dalam Islam

Sebagai agama *rahmatan lil'alamin*, Islam sangat memperhatikan keadilan sosial dan politik. Kezaliman (*al-zulm*), yang dalam konteks kekuasaan merujuk pada rezim yang melanggar etika moral dalam berpolitik. Dalam syari'at Islam, kezaliman dianggap sebagai tindakan yang sangat tercela dan sangat dilarang keras. Orang-orang yang menganut agama Islam diwajibkan untuk menegakkan keadilan dan melawan ketidakadilan, terlepas dari tindakan yang diambil oleh para pemimpin atau kekuatan politik.

Kezaliman dalam konteks sosial-politik kerap muncul ketika penguasa menggunakan otoritasnya bukan untuk melayani rakyat, melainkan untuk mengukuhkan kekuasaan dengan menindas, membungkam, dan menghapus hak-hak dasar masyarakat. Dalam sejarah Islam, salah satu kisah paling kuat yang menggambarkan perlawanan terhadap tirani politik adalah perjuangan Nabi Musa As. melawan Firaun. Firaun adalah simbol klasik dari rezim absolut yang menolak kebenaran, memperbudak manusia, dan menegakkan kekuasaan berdasarkan ketakutan. Ia bukan hanya menindas secara fisik, tetapi juga membentuk narasi dan struktur sosial yang membuat rakyat Mesir tunduk pada kehendaknya, bahkan mengklaim dirinya sebagai tuhan. Dalam situasi seperti ini, perjuangan Nabi Musa menjadi representasi dari bentuk perlawanan yang tidak hanya spiritual, tetapi juga politis dan sosial.

Selain itu, Firaun juga menggambarkan bentuk kezaliman struktural: ia mengklasifikasikan rakyat Mesir, menempatkan Bani Israil di posisi paling bawah, dan menindas mereka secara sistematis melalui kerja paksa, pelecehan, dan kekerasan. Ini adalah bentuk kezaliman yang terinstitusionalisasi, tidak selalu terlihat dalam satu kebijakan tunggal, tetapi meresap dalam cara negara dijalankan. Keadaan seperti inilah yang membuat kezaliman menjadi lebih sulit diatasi karena sudah menjadi bagian dari struktur sosial-politik. Maka, perjuangan Nabi Musa dapat dilihat sebagai inspirasi besar dalam membongkar sistem kezaliman yang terorganisasi dan menjadikan nilai-nilai kebenaran sebagai fondasi perlawanan (Gamal, n.d).

Menurut Imam al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, pemimpin yang melanggar amanah syariah dan menyimpang dari prinsip keadilan dan maslahat umat harus dikoreksi dan diingatkan oleh umat atau dewan syura. Konsep *imamah* (kepemimpinan) dalam Islam bukan sekadar struktur kekuasaan, melainkan menjadi fondasi utama dalam menjaga dan menegakkan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat. Kepemimpinan yang ideal mampu mengatur urusan publik dengan tertib dan adil, sehingga masyarakat merasakan kehadiran negara yang efektif dan berpihak pada kesejahteraan mereka. Dalam sistem ini, kebijakan yang lahir dari prinsip-prinsip syariah dan maslahat umat akan mendapat tempat yang lebih utama dibandingkan kebijakan negara yang hanya berorientasi pada kekuasaan semata. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang

dijalankan dengan nilai-nilai agama memiliki dampak yang jauh lebih mendalam dan berkelanjutan bagi kebaikan umat (Al-Mawardi, 2014).

Dalam pandangan Islam, politik tidak semata-mata soal kekuasaan, tetapi bagian integral dari upaya mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berpihak pada kebenaran. Konsep politik dalam Islam sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai spiritual dan moral, karena tujuannya bukan hanya untuk mengatur hubungan antar manusia, tetapi juga sebagai wujud ketaatan kepada Allah sebagai pemilik kekuasaan sejati. Maka dari itu, prinsip-prinsip konstitusional dalam sistem politik Islam dibangun di atas fondasi etik dan nilai-nilai universal yang diakui oleh wahyu dan akal sehat. Di antara prinsip utama dalam politik konstitusional Islam adalah keadilan, hubungan antara pengelola dan yang dikelola, kemaslahatan umum, serta tanggung jawab publik. Berikut adalah uraian masing-masing prinsip tersebut:

1. Prinsip Keadilan

Keadilan menempati posisi sentral dalam seluruh ajaran Islam, termasuk dalam kehidupan bernegara dan berpolitik. Hukum Islam secara eksplisit memerintahkan umat manusia untuk berlaku adil, dan bahkan menjadikan keadilan sebagai salah satu bentuk ibadah sosial yang utama. Dalam konteks politik, keadilan berarti memastikan bahwa setiap warga negara diperlakukan secara setara di hadapan hukum, tanpa diskriminasi atas dasar status sosial, suku, agama, atau kedekatan politik. Seorang pemimpin dalam sistem Islam wajib menegakkan hukum secara objektif dan tidak berpihak. Politik yang adil bukan hanya tidak menindas, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak dasar rakyat dipenuhi termasuk hak hidup, hak ekonomi, hak berbicara, dan hak mendapatkan perlindungan. Keadilan juga meliputi pengelolaan sumber daya secara merata, tanpa monopoli atau eksploitasi yang merugikan pihak-pihak yang lemah.

2. Prinsip Pengelola dan yang Dikelola

Islam mengajarkan bahwa kekuasaan sejatinya adalah amanah, bukan hak mutlak atau warisan. Rasulullah ﷺ bersabda (Al-Bukhari, 1981),

كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya...” (HR. Bukhari).

Dalam prinsip ini, seorang penguasa (pengelola) berkewajiban melayani, bukan menguasai rakyatnya. Relasi antara pemimpin dan masyarakat bukan relasi superior-inferior, melainkan hubungan timbal balik yang dibangun atas dasar tanggung jawab dan kepercayaan. Pemimpin harus mendengar suara rakyat, melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan (syura), serta mengelola pemerintahan demi kepentingan bersama, bukan kepentingan kelompok tertentu. Jika rakyat sebagai yang dikelola memiliki hak-hak dasar yang wajib dipenuhi, maka penguasa berkewajiban untuk memastikan hak itu sampai tanpa hambatan dan penyimpangan.

3. Prinsip Kemaslahatan

Salah satu landasan utama hukum dan kebijakan dalam Islam adalah kemaslahatan umat. Segala bentuk kebijakan politik harus memiliki tujuan yang jelas dalam melindungi atau memperkuat maslahat bersama. Ulama seperti Imam al-Ghazali dan Imam al-Syatibi menekankan bahwa tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī‘ah*) adalah untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka kebijakan publik yang

menimbulkan kemudharatan terhadap lima hal tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Dalam praktik politik, ini berarti bahwa pemerintah perlu mengedepankan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial, pemerataan ekonomi, pendidikan yang merata, dan lingkungan hidup yang berkelanjutan (Tanza & Sri, 2024). Maslahat juga menjadi alat ukur dalam mengkritisi kebijakan: jika suatu kebijakan lebih banyak membawa kerusakan daripada kebaikan, maka ia layak ditinjau ulang atau ditolak.

4. Prinsip Tanggung Jawab Publik

Dalam Islam, kekuasaan bukan hanya tentang bagaimana seseorang memimpin, tetapi bagaimana ia mempertanggungjawabkan kekuasaannya, baik di hadapan rakyat maupun di hadapan Allah ta'ala. Seorang pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas setiap kebijakan yang ia ambil, dan atas setiap ketidakadilan yang terjadi di bawah kepemimpinannya. Dalam kehidupan bernegara, ini berarti bahwa para pejabat publik harus bersedia diawasi, dikritik, dan terbuka terhadap transparansi kebijakan. Kepemimpinan yang tidak disertai akuntabilitas akan mudah tergelincir menjadi otoritarianisme atau bahkan kezaliman. Maka dari itu, penguatan lembaga pengawasan, partisipasi masyarakat, dan keterbukaan informasi merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip ini secara konkret (Suntana, 2010).

Dinamika Relasi antara Aktivistis dan Rezim Zalim

a. Sejarah dan Evolusi Aktivistis

Pada masa kenabian, cikal bakal aktivisme Islam sudah tumbuh. Wujudnya tampak dalam keberanian untuk menentang ketidakadilan, menolak sistem jahiliyah yang menindas, serta membela mereka yang tertindas dan tak bersuara. Nabi Muhammad Saw. sendiri bisa disebut sebagai tokoh utama dalam salah satu sejarah awal aktivisme Islam. Dengan tekad yang kuat dan hati yang tulus, beliau mengajak para pemuka Quraisy dan masyarakat Mekah untuk meninggalkan penyembahan berhala dan membangun peradaban baru yang berlandaskan tauhid, kesetaraan, dan keadilan sosial (Al-Mubarakfuri, 1997).

Kisah perjuangan ini tercatat dalam *Sirah Nabawiyah* karya Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, di mana digambarkan bagaimana Rasulullah Saw. bersama para sahabatnya berjuang menghadapi tekanan dan penindasan dari kaum Quraisy. Mereka tidak hanya melawan dengan kata-kata atau strategi, tetapi juga dengan keteguhan moral dan keteladanan sikap yang menyentuh hati banyak orang. Inilah fondasi awal dari sebuah gerakan yang tak sekadar ingin mengubah sistem, tetapi juga menyentuh nurani manusia.

Kemudian pada perkembangan aktivis Islam modern, Imam Hasan al-Banna (1906–1949) adalah salah satu sosok penting dalam sejarah kebangkitan aktivisme Islam. Ia bukan sekadar seorang pendakwah, tetapi pemikir dan organisator ulung yang mampu mengubah dakwah dari sekadar seruan keagamaan menjadi sebuah gerakan sosial-politik yang terstruktur. Pada tahun 1928, di Mesir, ia mendirikan Ikhwanul Muslimin sebuah organisasi yang pada awalnya fokus pada pembinaan moral dan pendidikan umat. Namun, dalam perjalanannya, gerakan ini berkembang menjadi kekuatan yang menentang kolonialisme, sekularisme, dan berbagai bentuk ketidakadilan sosial.

Motivasi Imam Hasan al-Banna tumbuh dari rasa prihatin terhadap kondisi umat Islam saat itu yang kian jauh dari ajaran Islam, terpinggirkan oleh pengaruh Barat, dan lemah dari dalam. Dalam sebuah jurnal, ditulis bahwa Ikhwanul Muslimin lahir untuk

menghidupkan kembali semangat Islam yang telah pudar dalam kehidupan masyarakat. Bagi Imam Hasan al-Banna, Islam bukan hanya agama yang mengatur hubungan spiritual dengan Tuhan, melainkan sistem hidup yang menyeluruh mencakup aspek politik, ekonomi, dan sosial. Ia menentang pemisahan antara agama dan urusan publik, serta meyakini bahwa syariat Islam mampu menjadi solusi atas berbagai masalah struktural dalam masyarakat. Melalui pemikiran dan perjuangannya, Imam Hasan al-Banna berhasil membangun fondasi yang kuat bagi aktivisme Islam yang tidak hanya idealistik, tetapi juga strategis dan berdampak nyata. Warisan perjuangannya telah menjadi inspirasi bagi berbagai gerakan Islam di dunia, termasuk di Indonesia, yang meneladani semangat perubahan dan keterlibatan aktif dalam menciptakan tatanan sosial yang lebih adil dan beradab (Musyarif, 2017)

Semangat aktivisme yang ditunjukkan oleh Hasan al-Banna dalam membangun kesadaran umat Islam juga terdapat pada contoh lain, yaitu dalam sejarah panjang gerakan mahasiswa di berbagai belahan dunia. Sejak abad ke-19, mahasiswa telah memainkan peran penting dalam mendorong perubahan sosial dan politik. Di Eropa, mahasiswa Jerman dan Italia terlibat dalam gerakan nasionalis yang mendukung unifikasi negara dan sistem pemerintahan demokratis. Di Amerika Serikat, mahasiswa mulai menunjukkan kepedulian terhadap isu-isu sosial seperti penghapusan perbudakan. Memasuki abad ke-20, peran mahasiswa semakin menonjol dalam berbagai revolusi besar. Dalam Revolusi Rusia tahun 1917, mahasiswa menjadi bagian dari kekuatan sosial-politik yang mendorong perubahan drastis dalam tatanan masyarakat. Di Tiongkok, Gerakan 4 Mei 1919 memperlihatkan semangat perlawanan mahasiswa terhadap pengaruh asing dan budaya kuno yang dianggap menghambat kemajuan, serta desakan kuat akan reformasi sosial dan politik.

Puncak aktivisme mahasiswa terjadi pada pertengahan abad ke-20. Di Amerika dan Eropa, mahasiswa menjadi motor penggerak dalam gerakan hak-hak sipil dan protes menentang Perang Vietnam. Tahun 1968, mahasiswa di Prancis dan Meksiko turun ke jalan untuk menuntut pembaruan dalam sistem pendidikan dan perlindungan hak asasi manusia. Di Eropa Timur dan Asia Tenggara, suara mahasiswa ikut menggema dalam perjuangan menggulingkan pemerintahan otoriter. Salah satu peristiwa paling mencolok adalah demonstrasi mahasiswa di Lapangan Tiananmen, Tiongkok, pada tahun 1989. Aksi yang dimulai dengan tuntutan atas kebebasan politik dan reformasi itu berakhir dengan kekerasan tragis, namun tetap menjadi simbol keberanian mahasiswa dalam melawan tirani.

Memasuki abad ke-21, aktivisme mahasiswa memasuki babak baru dengan memanfaatkan kekuatan teknologi digital. Media sosial dan platform daring menjadi alat efektif untuk mobilisasi massa dan kampanye global. Mahasiswa kini aktif dalam berbagai isu, mulai dari revolusi Arab Spring, gerakan keadilan iklim, hingga kampanye anti-rasisme seperti *Black Lives Matter*. Gerakan mahasiswa modern lebih inklusif dan berperspektif interseksional, tidak hanya berbicara soal politik dan pendidikan, tetapi juga menyentuh isu ketidakadilan berbasis ras, sosial, dan lingkungan. Kerja sama dengan organisasi nirlaba dan jaringan internasional turut memperkuat suara mereka. Meski strategi dan medianya berubah, semangat mahasiswa untuk menjadi agen perubahan tetap hidup dan relevan hingga hari ini (Syahputri & Katimin, 2024).

Dengan demikian, kisah-kisah perjuangan tersebut sejalan dengan pesan dalam hadis Ibnu Hibban No. 286 yang menegaskan bahwa keberpihakan pada kebenaran dan

ketegasan dalam menghadapi kezaliman adalah ciri nilai-nilai berharga yang dekat dengan Rasulullah Saw (Hibban, 2007).

b. Landasan Teologis

Munculnya rezim otoriter dan zalim merupakan fenomena yang terus berulang dalam sejarah manusia. Dalam Islam, kezaliman penguasa bukan sekadar persoalan kekuasaan, melainkan ujian bagi integritas moral dan spiritual umat. Ketika kekuasaan disalahgunakan untuk menindas, maka tugas untuk menegakkan keadilan tak hanya berada di pundak pemimpin formal, tetapi juga di tangan para aktivis baik ulama, mahasiswa, jurnalis, maupun masyarakat sipil lainnya. Mereka adalah suara kebenaran yang berani berdiri di garis depan untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Perlawanan terhadap kezaliman tidak selalu berbentuk konfrontasi terbuka, namun dapat diwujudkan lewat kesadaran publik, kritik yang jujur, dan konsistensi menjaga prinsip (Al-Ghazali, 1994). Dalam konteks ini, perjuangan aktivis sejalan dengan pesan Nabi Muhammad Saw. dalam hadis riwayat Ibnu Hibban No. 286, yang menegaskan bahwa siapa pun yang tidak membantu kezaliman dan tidak membenarkan kebohongan penguasa, maka ia termasuk bagian dari Rasulullah, dan Rasulullah adalah bagian darinya. Hadis ini menjadi pijakan moral bahwa keberanian melawan kezaliman adalah bentuk kedekatan spiritual dengan Nabi Saw (Hibban, 2007).

Islam memberikan pedoman jelas terkait sikap terhadap penguasa zalim. Beberapa dalil menegaskan pentingnya menolak ketidakadilan seperti berikut:

وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فْتَمَسْكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ

Artinya: *“Janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim sehingga menyebabkan api neraka menyentuhmu, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan.”*

Dalam menafsirkan QS. Hud ayat 113 pada kitab tafsir Ibnu Katsir, Abul ‘Aliyah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan larangan dalam ayat tersebut adalah agar kaum Muslimin tidak menunjukkan sikap ridha terhadap perbuatan orang-orang yang zalim. Artinya, kita tidak boleh bersikap permisif, apalagi mendukung tindakan kezaliman dalam bentuk apa pun. Sikap ini sangat penting karena ridha terhadap kezaliman berarti menyetujui dan merestui perbuatan tersebut secara tidak langsung.

Ibnu Jarir Ath-Thabari turut meriwayatkan pandangan dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa larangan *"janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim"* bermakna bahwa kita tidak boleh bergantung atau meminta bantuan kepada mereka. Ketika seseorang menjalin hubungan kedekatan atau menjadikan orang zalim sebagai tempat bergantung, hal ini secara tidak sadar menunjukkan adanya kecenderungan hati dan penerimaan terhadap kezaliman yang mereka lakukan. Padahal, dalam Islam, kezaliman adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, baik kecil maupun besar, baik dilakukan sendiri maupun disetujui orang lain.

Ibnu Katsir kemudian menegaskan bahwa ketika seseorang bersandar kepada pihak yang zalim atau menjadikan mereka sebagai penolong, maka secara implisit ia telah menunjukkan persetujuan terhadap tindakan mereka. Akibat dari sikap ini sangatlah berat, karena Allah memperingatkan bahwa siapa pun yang bersikap demikian tidak akan memiliki pelindung atau penolong yang dapat membebaskannya dari azab Allah, kecuali jika ia benar-benar kembali kepada-Nya dengan taubat yang tulus (Katsir, 2017).

Dalam ayat ini juga dijelaskan pada Tafsir Al-Munir bahwa Allah Swt. memperingatkan umat Islam agar tidak memiliki kecenderungan hati kepada orang-orang yang berbuat zalim. Larangan ini mencakup berbagai bentuk simpati, seperti menunjukkan kasih sayang, berbicara manis atau basa-basi, merestui tindakan mereka, meminta bantuan kepada mereka, atau menggantungkan harapan kepada mereka. Semua bentuk kecenderungan ini bisa menyeret seseorang pada kebinasaan, bahkan mengantarkannya kepada siksa api neraka.

Allah menegaskan bahwa bersikap lunak atau mendukung pihak yang zalim, sekecil apa pun, termasuk bagian dari kezaliman itu sendiri. Dan apabila seseorang sampai terjerumus dalam sikap demikian, maka tidak akan ada siapa pun yang bisa menolongnya dari murka Allah. Tidak ada pelindung ataupun pembela yang mampu menyelamatkan dari azab-Nya, karena Allah tidak memberikan pertolongan kepada orang-orang yang melakukan kezaliman atau mendukungnya (Az-Zuhaili, 2016).

Selain itu terdapat juga pada salah satu hadis seperti berikut:

Dari Abu Sa'id Al Khudri, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

Artinya: "Jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran (berkata yang baik) di hadapan penguasa yang zalim." (HR. Abu Daud no. 4344)

Hadis tersebut menegaskan bahwa salah satu bentuk jihad terbaik bukanlah semata-mata dengan senjata atau kekuatan fisik, melainkan dengan keberanian moral untuk menyuarakan kebenaran di hadapan pemimpin yang berlaku zalim. Mengungkapkan kebenaran dalam situasi seperti ini menuntut keberanian luar biasa karena risikonya besar mulai dari intimidasi hingga penghilangan nyawa. Namun, tindakan ini adalah bentuk kepedulian terhadap masyarakat luas dan upaya menjaga nilai-nilai keadilan serta integritas. Dalam konteks sosial dan politik, hadis ini memberikan pesan kuat bahwa perlawanan terhadap kezaliman harus tetap dilakukan secara jujur dan bermartabat, tanpa rasa takut terhadap kekuasaan yang menindas. Ini juga menunjukkan bahwa Islam memuliakan peran aktivisme yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab, bukan berdasarkan emosi atau kepentingan pribadi (Muhammad, 2013).

Kajian Hadis Riwayat Imam Ibnu Hibban No. 286

[٢٨٦] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُتَنِّيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (سَيَكُونُ مِنْ بَعْدِي أُمَرَاءٌ، يَغْتَابُهُمْ غَوَاشٍ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ صَدَقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ وَهُوَ مِنِّي بَرِيءٌ - وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ مِنِّي).

Artinya: 286. Ahmad bin Ali Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, dia berkata: Al Muqaddami menceritakan kepada kami, dia berkata: ayahku mengabarkan kepadaku, dari Qatadah dari Sulaiman bin Abi Sulaiman dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi Saw., beliau bersabda, "Kelak, setelah aku (wafat), akan muncul para penguasa. Mereka dikerumuni oleh manusia. Siapa yang membenarkan kebohongan mereka dan membantu kezhalimannya, maka aku berlepas diri darinya, dan dia berlepas diri dariku. Dan siapa yang tidak membenarkan kebohongan mereka dan tidak membantu kezhalimannya, niscaya aku adalah bagian dari dirinya dan dia adalah bagian dari diriku." (Hibban, 2007)

1. Makna Hadis Riwayat Ibnu Hibban No. 286

Secara historis, hadis ini mencerminkan pandangan Rasulullah Saw. terhadap kondisi umat Islam pasca kenabian. Rasulullah memberi isyarat akan datangnya masa ketika kepemimpinan umat tidak lagi selalu dipenuhi oleh keadilan dan kebenaran. Dalam konteks itu, para pemimpin yang dimaksud bukan hanya menjalankan kekuasaan, tetapi juga dikelilingi oleh orang-orang yang menjadi pendukung mereka.

Dalam hadis ini, Nabi Saw. membagi umat menjadi dua golongan:

1. Golongan yang membenarkan kebohongan dan membantu kezaliman penguasa. Rasulullah Saw. secara tegas menyatakan bahwa beliau berlepas diri dari golongan ini. Pernyataan "فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ، وَهُوَ مِنِّي بَرِيءٌ" mengandung makna pemutusan hubungan spiritual dan moral antara Nabi Saw. dan orang tersebut. Ini menunjukkan betapa seriusnya dosa membenarkan kebohongan dan mendukung kezaliman, apalagi jika itu dilakukan terhadap pemimpin yang menyimpang. Orang yang tergolong dalam kelompok ini tidak hanya menoleransi kezaliman, tetapi justru menjadi bagian dari sistem yang menindas. Dukungan terhadap kezaliman dianggap sebagai partisipasi aktif dalam kebatilan, yang membuat seseorang keluar dari lingkaran bagian dari golongan Rasulullah Saw.
2. Golongan yang tidak membenarkan kebohongan dan tidak membantu kezaliman, yaitu mereka inilah yang mendapatkan pengakuan dukungan dari Rasulullah Saw sekaligus diakui sebagai bagian dari umatnya. Ungkapan "فَأَنَا مِنْهُ، وَهُوَ مِنِّي" menandakan adanya ikatan keimanan, dan kedekatan moral antara Nabi dengan orang-orang yang tetap teguh dalam kebenaran dan keadilan, walau di tengah tekanan kekuasaan. Sikap tidak membenarkan kebohongan dan tidak membantu kezaliman adalah bentuk nyata dari *amar ma'ruf nahi munkar*.

2. Tinjauan Sanad

Sanad perawi hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Ibn Hibban adalah:

Ahmad bin Ali al-Mutsanna → Al-Muqaddami → Mu'adz bin Hisyam → Hisyam (ayah Mu'adz) → Qatadah → Sulaiman bin Abi Sulaiman → Abu Sa'id al-Khudri → Nabi Muhammad Saw.

Sanad ini menunjukkan mata rantai periwayatan yang panjang. Di antara para perawi tersebut, seluruhnya adalah perawi yang terpercaya (*tsiqah*), kecuali satu nama yang perlu perhatian khusus, yakni Sulaiman bin Abi Sulaiman dikarenakan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama hadis.

Berikut adalah penilaian ulama terhadap perawi Sulaiman bin Abi Sulaiman:

1. Ibnu Hibban

Ibnu Hibban memasukkan Sulaiman bin Abi Sulaiman ke dalam kitabnya *Ats-Tsiqat*, yang hanya memuat para perawi yang dianggap terpercaya dan memasukan hadis ini ke kitabnya yaitu *Shahih Ibnu Hibban*. Hal ini menunjukkan bahwa menurut Ibnu Hibban, Sulaiman merupakan perawi yang *tsiqah* dan dapat diterima riwayatnya.

2. Al-Haitsami

Al-Haitsami mencatat bahwa hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Ya'la melalui sanad yang serupa. Ia mengatakan bahwa pada sanadnya terdapat perawi bernama Sulaiman bin Abi Sulaiman Al-Qurasyi, namun beliau tidak mengenalnya. Kemudian beliau berpendapat bahwa para perawi lainnya pada hadis tersebut adalah perawi hadis yang sah. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Al-Haitsami meragukan

status Sulaiman karena ketiadaan informasi yang cukup, meskipun beliau mengakui bahwa perawi lainnya tergolong kuat dan sahih. Dalam ilmu hadis, hal ini bisa menunjukkan bahwa perawi bernama Sulaiman tersebut belum dikenal secara luas (*majhul*).

Strategi Aktivistis dalam Menghadapi Rezim Zalim

Dalam perjalanan sejarah, berbagai bentuk kekuasaan yang zalim kerap menjadi tantangan besar bagi para pejuang kebenaran. Rezim yang menindas sering kali menggunakan kekuatan politik, militer, maupun ideologis untuk mempertahankan dominasinya dan membungkam suara-suara perlawanan. Dalam kondisi seperti ini, perjuangan tidak cukup hanya dengan semangat perlawanan spontan, melainkan membutuhkan strategi yang terstruktur dan penuh kesadaran (Hendardi, 2020). Berikut adalah bentuk strategi aktivis dalam menghadapi Rezim Zalim:

1. Keteguhan Iman yang Mengakar Kuat

Keteguhan iman yang mengakar kuat merupakan fondasi utama dalam setiap perjuangan menegakkan kebenaran di tengah kezaliman. Seorang pejuang yang benar-benar beriman tidak akan mudah goyah oleh tekanan, ancaman, maupun godaan duniawi, karena hatinya telah tertambat pada keyakinan bahwa Allah senantiasa bersama hamba-hambanya yang beriman dan sabar (Ibrahim, 2022). Hal ini sebagaimana janji Allah Swt. pada Qs. Al-Hajj ayat 40:

وَلْيُنْصِرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: “Sungguh, Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa.”

Menurut penafsiran Imam ath-Thabari, ayat ini menunjukkan bahwa Allah pasti akan memberikan pertolongan-Nya kepada siapa pun yang berjuang di jalan-Nya demi meninggikan kalimat tauhid dan melawan para penentang kebenaran. Pertolongan dari Allah itu berupa dukungan langsung dalam bentuk kekuatan, kemenangan, dan penjagaan atas para pejuang yang tulus. Sementara itu, bentuk pertolongan hamba kepada Tuhannya adalah dengan menjalankan jihad yang benar, bukan sekadar fisik, tetapi juga mencakup pengorbanan tenaga, pikiran, dan jiwa demi menegakkan agama-Nya. Ketika Allah menegaskan bahwa Dia "Maha Kuat lagi Maha Perkasa", hal ini bermakna bahwa Allah memiliki kemampuan mutlak untuk menolong hamba-hambanya yang setia dan taat. Dia tidak pernah lemah dalam memberikan bantuan, dan tidak ada satu pun kekuatan yang mampu menghalangi kehendak-Nya (Thabari & Muhammad, 2007).

Selain itu, sejarah mencatat teladan luar biasa dari Imam Ahmad bin Hanbal, yang tetap teguh dalam mempertahankan keyakinan bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah, meski harus mengalami siksaan berat dari penguasa pada masa itu karena fitnah penciptaan Al-Qur'an. Keteguhan beliau tidak hanya menunjukkan kekuatan pribadi, tetapi juga menggambarkan bagaimana iman yang mantap mampu menjadi perisai dalam menghadapi penguasa zalim. Janji Allah bahwa Dia akan menolong orang-orang beriman menjadi penyemangat sekaligus penguat jiwa, bahwa perjuangan yang dilandasi iman tidak pernah sia-sia, bahkan ketika jalan yang ditempuh penuh luka dan ujian (Ibrahim, 2022).

2. Pembentukan Kader Pelopor

Dalam pandangan Sayyid Qutb, strategi utama aktivis Islam dalam menghadapi rezim zalim dimulai dengan pembentukan kader pelopor yang kokoh secara spiritual dan

ideologis. Kader ini bukan hanya sekadar penggerak lapangan, tetapi merupakan fondasi utama dalam membawa perubahan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, proses pembinaan harus berfokus pada penguatan akidah dan internalisasi nilai-nilai Al-Qur'an, agar mereka tidak terpengaruh oleh sistem jahiliah yang telah mengakar dalam tatanan masyarakat.

3. Pendidikan

Sayyid Qutb menekankan bahwa perjuangan sejati dalam membangun peradaban Islam tidak bermula dari perebutan kekuasaan atau manuver politik semata, melainkan melalui proses pendidikan yang mendalam dan berkelanjutan yang berpusat pada Al-Qur'an dan Sunnah. Menurutnya, perubahan hakiki hanya dapat terjadi ketika akidah tertanam kuat dalam diri individu, disertai dengan kesadaran akan tanggung jawab sebagai hamba Allah dan agen perubahan. Oleh karena itu, pendidikan menjadi sarana utama dalam mentransformasi pola pikir dan membentuk karakter umat. Dengan membangun masyarakat dari akar rumput melalui penanaman nilai-nilai tauhid dan pembentukan akhlak, Sayyid Qutb percaya bahwa akan lahir generasi yang mampu membawa perubahan sosial secara menyeluruh dan berkelanjutan, tanpa harus tunduk pada sistem yang zalim atau menyimpang (Sayyid, 2001).

4. Aksi Non-Kekerasan Gene Sharp

Dalam strategi perjuangan non-kekerasan yang dirumuskan oleh Gene Sharp, terdapat pendekatan-pendekatan penting yang dapat diterapkan dalam konteks melawan ketidakadilan struktural, terutama ketika rezim menggunakan kekerasan dan propaganda sebagai alat kekuasaan. Salah satu langkah utama yang harus dilakukan adalah "pendokumentasian sistematis atas pelanggaran hak asasi manusia." Ini berarti setiap tindakan kekerasan, penindasan, atau penyalahgunaan kekuasaan harus dicatat secara detail dan rapi baik melalui video, laporan tertulis, kesaksian korban, maupun data pendukung lainnya. Tujuannya bukan hanya untuk menciptakan arsip sejarah, tetapi juga sebagai alat untuk menyadarkan publik dan membangun tekanan moral serta politik dari komunitas internasional. Selain itu, penting untuk "menampilkan korban sebagai manusia utuh", bukan sekadar angka statistik atau stempel yang dilekatkan oleh penguasa. Upaya ini mencakup narasi yang mengangkat sisi kemanusiaan mereka, siapa mereka sebelumnya, bagaimana kehidupan mereka berubah, serta penderitaan yang mereka alami. Pendekatan ini mampu membangun empati publik dan menghancurkan stereotip negatif yang selama ini dilekatkan oleh propaganda. Dalam kaitannya dengan itu, langkah berikutnya adalah "melakukan reinterpretasi terhadap narasi publik." Artinya, aktivis harus mampu membongkar dan menantang narasi resmi yang dibangun oleh rezim yang sering kali penuh kebohongan atau manipulasi dengan cara menyuguhkan data alternatif, perspektif korban, serta penjelasan yang lebih adil dan objektif. Dengan strategi ini, ruang kesadaran kolektif dapat dibuka, dan opini masyarakat dapat digiring menuju keadilan dan kebenaran yang lebih hakiki (Martin, 2012).

5. Memanfaatkan Ruang Digital

Di era digital saat ini, para aktivis memiliki alat yang sangat kuat untuk melawan ketidakadilan, yakni ruang digital. Media sosial seperti Instagram, TikTok, X, dan Facebook telah menjadi semacam panggung terbuka tempat suara-suara perlawanan bisa didengar luas, bahkan melampaui batas geografis. Dalam situasi di mana rezim menekan

dan membungkam lewat cara-cara lama, mahasiswa justru merespons dengan cara baru: menyampaikan pesan secara cepat, kreatif, dan penuh daya tarik visual. Mereka tidak lagi hanya berdemonstrasi di jalan, tapi juga menciptakan infografis, video singkat, dan poster digital yang menjelaskan persoalan pelik dengan bahasa yang bisa dipahami semua orang. Tagar yang disusun secara strategis bisa menyatukan suara banyak pihak, membuat isu lokal menjadi perbincangan nasional atau bahkan global. Di balik layar, mereka juga saling terhubung lewat aplikasi seperti WhatsApp dan Telegram untuk menyusun langkah bersama secara lebih rapi. Yang tak kalah penting, kini mereka juga bisa membaca data dan pola respons masyarakat untuk memperbaiki strategi gerakan. Semua ini menunjukkan bahwa ruang digital bukan sekadar tempat berbicara, tapi juga medan perjuangan yang memungkinkan aktivis menghadapi kekuasaan yang zalim dengan cara yang cerdas, kreatif, dan bermartabat (Syahputri & Katimin, 2024).

6. Siap dalam Menghadapi Tantangan Aktivis Modern di Tengah Tekanan Rezim

Di era modern yang kian kompleks, para aktivis menghadapi tiga tantangan utama yang saling berkaitan: penyebaran disinformasi, kesenjangan teknologi, dan respons represif dari pemerintah. Berikut adalah uraian dari tantangan-tantangan tersebut:

1) Gelombang Disinformasi

Penyebaran hoaks dan informasi palsu telah menjadi momok bagi gerakan sosial modern. Yang paling mengkhawatirkan adalah kecepatan viralnya konten palsu yang kerap lebih cepat daripada proses verifikasi fakta. Media sosial dengan algoritmanya yang bias justru memperparah masalah ini, di mana konten sensasional lebih mudah mendapatkan tempat di linimasa masyarakat. Rendahnya literasi digital turut memperkeruh situasi. Banyak pengguna internet yang belum mampu membedakan antara berita valid dan konten manipulatif. Celah ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan narasi-narasi yang memecah belah atau mendiskreditkan gerakan sosial. Tak jarang, aktivis justru menjadi korban dari framing negatif yang sengaja disebar untuk melemahkan perjuangan mereka.

2) Kesenjangan Teknologi yang Memperlebar Ketimpangan

Di balik kemajuan teknologi, ternyata masih banyak aktivis yang terhambat oleh masalah akses. Di daerah pedesaan atau wilayah terpencil, ketersediaan infrastruktur internet yang stabil masih menjadi mimpi. Jangankan untuk mengunggah konten kampanye, sekadar mengakses informasi terbaru pun seringkali terkendala sinyal yang lemah. Persoalan ekonomi juga menjadi penghalang besar. Tidak semua aktivis mampu membeli perangkat canggih atau berlangganan paket internet yang memadai. Akibatnya, mereka yang berasal dari kalangan tersebut semakin tertinggal dalam perlombaan narasi di ruang digital. Padahal, gerakan sosial seharusnya bersifat inklusif dan mampu menampung suara dari berbagai lapisan masyarakat.

3) Respons Pemerintah yang Cenderung Represif

Alih-alih membuka ruang dialog, banyak pemerintah justru memilih pendekatan represif terhadap aktivis. Pengawasan ketat terhadap aktivitas online, pemanfaatan UU ITE untuk kriminalisasi di ruang lingkup digital, hingga penggunaan kekerasan fisik menjadi senjata untuk membungkam suara kritis yang dilakukan oleh sebagian aparat penegak hukum. Yang tak kalah memprihatinkan adalah maraknya propaganda balasan yang sengaja dirancang untuk mengaburkan fakta. Dengan membanjiri ruang digital

dengan narasi tandingan, pemerintah berusaha mengalihkan isu dan merusak kredibilitas gerakan sosial. Taktik ini seringkali berhasil menciptakan keraguan di tengah masyarakat, bahkan di kalangan pendukung gerakan itu sendiri.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa perjuangan aktivis di bawah tekanan rezim zalim bukan sekadar respons sosial-politik, melainkan refleksi dari keteguhan iman dan implementasi nilai-nilai syariat secara menyeluruh. Hadis riwayat Ibnu Hibban No. 286 menjadi fondasi teologis utama yang menempatkan keberanian menyuarakan kebenaran di hadapan penguasa zalim sebagai jihad, sekaligus indikator kedekatan spiritual dengan Rasulullah Saw.

Argumentasi utama yang muncul adalah bahwa keberpihakan terhadap keadilan merupakan pembeda moral antara mereka yang berada dalam lingkaran golongan kebenaran dan mereka yang tergelincir dalam kezaliman. Siapa pun yang membenarkan kebohongan dan membantu kezaliman penguasa telah memutuskan tali hubungan dengan Rasulullah, sebagaimana penegasan dalam sabda beliau bahwa beliau berlepas diri dari orang-orang semacam itu. Sebaliknya, orang yang tetap teguh menolak kebohongan dan kezaliman, meski dalam tekanan, digolongkan sebagai bagian dari golongan kebenaran. Dengan demikian, perjuangan aktivis yang konsisten membela kebenaran dan menolak kezaliman memiliki kedudukan mulia dalam pandangan Islam, baik secara historis maupun teologis. Mereka adalah penjaga nilai-nilai kenabian yang tak hanya melawan dengan lisan dan pikiran, tetapi juga dengan keberanian hati untuk tetap berada di pihak yang benar meskipun dunia menentangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Almascaty, H. B. (2001). *Panduan jihad, untuk aktivis gerakan Islam*. Gema Insani.
- Alzam, Ummu. (2017). *Rezim Zalim Haram Didukung*, dalam <https://www.kompasiana.com>
- Bukhari, al. (1981). *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ghazali, al. (1994). *Nasihat bagi penguasa* (Penerj: Ahmadie Thaha & Ilyas Ismail.). Bandung: Mizan.
- Gramsci, Antonio. (2023). *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, diakses pada tanggal 09/04/25 dari; https://plato.stanford.edu/entries/gramsci/?utm_ege
- Hendardi. (2020). *Jejak Aktivisme Hendardi: Dari Gerakan Mahasiswa ke Advokasi Hukum dan HAM*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Ibnu Hibban. (2007). *Shahih Ibnu Hibban* (Penerj: Mujahidin Muhayan, Saiful Rahman Barito). Jakarta: Pustaka Azzam
- Ibnu Katsir. (2017). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Ibrahim, N. (2022). *Kepada Aktivis Muslim*. Solo: Aqwam.
- Ija Suntana. (2010). *Pemikiran ketatanegaraan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Komandoko, Gamal. (n.d). *Riwayat 25 Nabi dan Rasul*. Mutiara Media.
- Martin, B. (2012). *Panduan serangan balik: Taktik melawan ketidakadilan*. Irene Publishing.
- Mawardi, al, I. (2014). *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Penerj: Khalifurrahman Fath & Fathurrahman.). Jakarta: Qisthi Press.
- Mubarakfuri, al, S. (1997). *Sirah Nabawiyah* (Penerj: K. Suhardi, Y. Maqsodi.). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Muhammad, Abduh Tuasikal. (2013). *Jihad dengan Menasehati Penguasa yang Zalim*. Diakses

pada tanggal 26/05/2025 dari <https://rumaysho.com/3401-jihad-dengan-menasehati-penguasa-yang-zalim.html>

- Musyarif, M. (2017). *Hasan Al-banna Al-ikhwan Al-muslimun*. *Kuriositas*, 11(1).
- Natalia, Angga. (2015). *Peran Partai Politik dalam Mensukseskan Pilkada Serentak di Indonesia Tahun 2015*, *Jurnal TAPIS*, 11(1).
- Pertiwi Dona Tanza, Herianingrum Sri. (2024). *Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01).
- Quthb, Sayyid. (2001). *Petunjuk Jalan*, (Terj. Abdul Hayyie dan Yodi). Jakarta: Gema Insani.
- Setyo Puji. (2021). *Soal Penangkapan Aktivis HMI, Kuasa Hukum: Ada Upaya Pembungkaman Demokrasi*, dalam
- Syahputri, I. B., & Katimin. (2024). *Pengaruh aktivis mahasiswa dalam perubahan sosial politik di era digital 5.0*. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(4).
- Thabari, al, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. (2007). *Jami' Al-Bayan an Ta'wil Al-Qur'an* (Penerj: Abdul Somad, Yusuf Hamdani, dkk). Jilid 18. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Zuhaili, al, W. (2016). *Tafsir al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)* (Penerj: A. H. al-Kattani). Jakarta: Gema Insani.